KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA | BAPPEBTI MINISTRY OF TRADE	**News Title** : Pemerintah Kembali Blokir 249 Domain Situs PBK Ilegal	
	Media Name : validnews.id	**Journalist** : Khairul Kahfi
	Publish Date : 18 September 2021	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Bappebti)	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	**Topic** : Blokir Situs Ilegal

18 September 2021 | 18:00 WIB

Pemerintah Kembali Blokir 249 Domain Situs PBK Ilegal

Bappebti selama Januari-Agustus 2021 telah memblokir sebanyak 954 domain.

Penulis: Khairul Kahfi
Editor: Fin Harini



Ilustrasi investasi. Shutterstock/dok

JAKARTA - Selama Agustus 2021, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kemendag bekerja sama dengan Kemkominfo, memblokir 249 domain situs web entitas bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tak berizin resmi.

Tindakan tegas dilakukan untuk melindungi konsumen. Sebagai pengawas PBK, pemblokiran ini melengkapi kinerja Bappebti Januari-Agustus 2021 yang telah memblokir sebanyak 954 domain.

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menegaskan, pemblokiran selama Agustus 2021 menjadi yang terbanyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Banyak domain yang membuat penawaran, iklan, serta promosi mengenai PBK tanpa izin Bappebti. Karena itu, pemerintah meminta masyarakat lebih waspada sebelum berinvestasi di bidang PBK.

"Pemblokiran Agustus 2021 ini menjadi yang terbanyak sepanjang 2021. Pengawasan dan pengamatan ini bertujuan untuk mencegah kerugian masyarakat," jelasnya dalam keterangan yang diterima, Jakarta, Sabtu (18/9).

Ia kembali menegaskan, saat ini banyak modus baru yang muncul untuk menarik masyarakat agar tergiur mengikuti investasi di bidang PBK. Tanpa perlu memperhatikan pentingnya memiliki pengetahuan mekanisme *trading* PBK.

Domain website entitas tak berizin Bappebti yang dihimpun selama Agustus, secara umum terdiri atas duplikasi website dari pialang berjangka yang memiliki perizinan dari Bappebti, situs web *introducing broker* dari pialang berjangka luar negeri, dan penawaran paket investasi forex berkedok penjualan robot trading.

Selain kegiatan pengawasan dan pengamatan, informasi mengenai domain situs entitas tanpa perizinan di bidang PBK juga bersumber dari laporan masyarakat.

Plt Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M Syist menambahkan, selain terpantau menggunakan modus-modus lama, sejumlah entitas yang diblokir tersebut juga terpantau menggunakan modus baru.

"Modus paling baru adalah penawaran paket investasi forex berkedok penjualan robot *trading* melalui paket-paket investasi dengan menggunakan sistem *member get member*," terang Syist.

Namun umumnya, lanjutnya, seperti entitas yang pernah diblokir Bappebti sebelumnya, entitas-entitas yang diblokir saat ini masih menjalankan modus-modus yang sudah sering digunakan.

"Biasanya menawarkan investasi berkedok forex dengan menjanjikan *fixed income* dalam bentuk paket-paket investasi, dengan mendompleng legalitas pialang berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti. Menjadi *introducing broker* (IB) dari pialang luar negeri, penawaran binary option atas kontrak komoditas seperti emas, dan kontrak mata uang," ujarnya.

Selama pemantauan Agustus juga, Bappebti masih menemukan penawaran, iklan, dan iklan investasi PBK menggunakan robot *trading* atau Expert Advisor (EA). Mereka menampilkan legalitas berupa Surat Izin Penjualan Langsung (SIUPL) untuk berusaha di bidang penjualan langsung berupa software e-book.

Namun kenyataan di lapangan, Bappebti justru menemukan adanya praktik-praktik penawaran paket-paket investasi dengan menggunakan robot *trading* (EA). Menggunakan *sistem get member*, bukan menjual e-book sebagaimana izin berusaha di bidang penjualan langsung tersebut diberikan.

Terdapat juga entitas yang menawarkan paket investasi robot *trading* hanya dengan mencantumkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Perlu diketahui, segala bentuk kegiatan usaha perdagangan tersebut memerlukan perizinan yang lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usahanya, bukan hanya SIUP dan NIB saja. Dalam hal berkegiatan usaha di bidang PBK, izin usaha harus didapatkan dari Bappebti," tegas Syist.

Syst juga mengatakan, Bappebti tidak akan lelah mengimbau masyarakat untuk lebih jeli dalam memilih investasi di bidang PBK.

"Selalu pastikan legalitas dari pialang berjangka yang menawarkan investasi dan jangan mudah tergiur, dengan penawaran investasi yang memberikan iming-iming keuntungan pasti di luar batas kewajaran yang didapatkan dalam waktu singkat,"kata Syist.

Ia juga meminta masyarakat selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi. Apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai *downline*, karena perdagangan berjangka tidak mengenal istilah tersebut.

Informasi lengkap mengenai legalitas pelaku usaha di bidang PBK dapat dilihat melalui website resmi Bappebti https://www.bappebti.go.id.